

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO 45 THN 2022. SETDA :28 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TENTANG PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .

ABSTRAK :- Bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintah yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,efisien ,transparan,dan akuntabel sejhalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah maka perlu didukung sistem pemerintah berbasis elektronik secara terpadu berdasarkan ketentuan pasal 61 (1) peraturan presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ,dimana bupati mempunyai tugas melakukan kordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintah berbasis elektronik dipemerintah daerah.. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan darurat NO 3 TAHUN 1953 NO 9 Ssebagai undang-undang (Lembaran negara republik indonesia tahun 1959 Nomor 72, lembaran negara Nomor 1820 Sebagaimana nomor 8 tahun 1965 tentang pembentukan daerah tingkat II tabalong dengan mengubah undang undang nomor 27 tahun 1959 tentang perpanjangan pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan .lembaran negara tahun 1965 Nomor 51 tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 2756. Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tahun 2008 Nomor 4843 diubah menjadi undang - undang Nomor 19 tahun 2016 Nomor 251. Nomor 2756.

CATATAN ; Peraturan daerah ini mulai ditetapkan tanggal 26 September 2022 Diundangkan pada tanggal 26 September 2022.